

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Landasan Teoritis	16
G. Metode Penelitian	30
H. Orisinalitas Penelitian	35
I. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA, DAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA	41
A. Pemerintah Daerah	41
B. Pemerintah Desa.....	71
C. Pemilihan Kepala Desa	78
D. Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	81
BAB III PENGATURAN PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	83
A. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa.....	83
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	86

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	90
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ..	93
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	106
a. Peraturm Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa	106
b. Peraturm Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	117
5. Peraturan Bupati	120
a. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	120
b. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa	151
B. Sengketa Pilkades Serentak Kabupaten Batang Hari Tahun 2021	157
1. Perselisihan Pada Pilkades Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari.....	159
2. Perselisihan Pada Pilkades Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari	163
C. Sengketa Pilkades Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci pada Pilkades serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021	165
BAB IV KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA	169
A. Keabsahan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	169
B. Pembatalan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	172
BAB V PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	181